

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertarungan panjang yang melibatkan ideologi demokrasi liberal dengan komunisme diktatorial pada akhirnya menjadikan demokrasi liberal sebagai pusat ideologi dunia tanpa imbang, sekaligus menandakan ujung dari perjalanan perdebatan panjang eksistensi ideologi. Masyarakat global tidak lagi menjadikan ideologi sebagai pusat rutinitas politik. Berbagai norma yang telah diilhami sejak lama pun akhirnya tersingkirkan, dalam artian tidak lagi relevan jika dijadikan sebagai rujukan atas perilaku politik. Rentetan historis tersebut merupakan kilasan atas kelahiran demokrasi sehingga menghasilkan apa yang disebut dengan ‘negara’ seperti saat ini. Kekuatan sejati negara demokrasi pada era politik kontemporer tentunya tidak terletak pada pemerintahannya, melainkan terletak pada masyarakatnya. Menjadi sebuah kewajiban bagi negara demokrasi untuk berperan aktif dalam rangka mengembangkan segenap potensi yang ada di tengah kehidupan masyarakat secara bebas dan adil. Makna bebas dalam kehidupan demokrasi di Indonesia sejatinya telah dijamin oleh konstitusi melalui amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, khususnya pada pasal 28 E. Hal tersebut yang kemudian menjadi dasar untuk melakukan pembentukan, pengembangan, serta pemeliharaan partai politik di Indonesia (Pasaribu, P., 2017).

Eksistensi partai politik merupakan bentuk representasi masyarakat dalam perjalanan kehidupan pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2008 pasal 11 tentang Partai Politik, pada dasarnya terdapat lima fungsi utama partai politik, yakni: *Pertama*, memberikan pendidikan politik bagi masyarakat luas guna meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. *Kedua*, menciptakan iklim kondusif sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa. *Ketiga*, menyerap, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi masyarakat. *Keempat*, partisipasi warga negara, dan yang *kelima* sebagai rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik. Kehadiran partai politik juga sejatinya merupakan cerminan dari keinginan masyarakat yang ingin mendapatkan hak mendasar mereka. Oleh karena itu, nilai-nilai kepartaian seharusnya wajib bertumpu pada kedaulatan rakyat serta mampu membendung berbagai aspek kesetaraan dan kebersamaan demi menciptakan keharmonisan demokrasi. Namun pada kenyataannya, tidak semua fungsi tersebut dilaksanakan oleh partai politik yang ada. Partai politik belum mampu melakukan fungsi pendidikan politik secara penuh, baik dalam lingkup internal partai maupun terhadap masyarakat secara keseluruhan (Kusuma, Widiati & Suryani, 2020).

Kegagalan partai politik dalam melaksanakan fungsi pendidikan politik di era politik kontemporer pada akhirnya dapat menciptakan masyarakat yang apatis terhadap keberlangsungan sistem pemerintahan. Lebih daripada itu, kegagalan partai politik dalam melakukan pendidikan politik kemudian dapat melahirkan individu yang tidak memiliki tanggungjawab dan kesadaran bahwa pengawalan atas proses demokrasi merupakan tugas bersama. Peta jalan pendidikan politik bagi generasi selanjutnya tidak

didasarkan pada semangat emansipasi dan tidak memperkuat prinsip-prinsip kesetaraan dalam struktur kelembagaan politik. Contohnya, pada proses kaderisasi partai tertentu masih terdapat hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara kader senior dan junior. Sehingga, diperlukan media pelaksana pendidikan politik yang relevan serta mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat, sebagai subjek yang menjadi sasaran paling dekat dengan politik.

Terdapat dua alasan utama yang melatarbelakangi penelitian, yaitu alasan teoritik dan alasan empirik. Alasan teoritik merupakan landasan yang menjadi dasar pentingnya penelitian ini untuk dilakukan. Alasan teoritik pada umumnya merupakan hasil atau temuan yang dikemukakan oleh beberapa ahli dan berkaitan dengan bidang penelitiannya. Adapun alasan teoritik dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Pertama, secara literal, kontemporer merupakan segala hal yang berkaitan dengan waktu yang sama atau masa kini. Selaras dengan apa yang disampaikan oleh Yusuf H (2012), politik kontemporer merupakan penampakan dunia saat ini, di mana masyarakat hanya ditempatkan pada posisi marginal dan niscaya akan melahirkan berbagai konflik horizontal maupun vertikal. Kondisi peradaban kekinian telah melahirkan makna yang jauh berbeda atas politik yang sesungguhnya. Kompleksitas atas berbagai permasalahan politik terus merajalela, contoh konkret yang masif terjadi adalah maraknya serangan siber, politik uang yang kemudian secara sistematis melahirkan politik identitas, diskriminasi terhadap pandangan politik, dendam

dan pertarungan antar kubu pesaing, serta tindakan adu domba yang tidak berkesudahan dari kelompok tertentu. Meskipun demikian, pada hakikatnya, politik kontemporer harus dimaknai sebagai perjalanan panjang dalam berkaca politik. Dalam artian, menemukan atau ditemukannya kembali gairah ketika menatap wajah orang lain sebagai perwujudan ‘wajahku’ di sana.

Kedua, tidak dapat dipungkiri bahwa kompleksitas politik di era politik kontemporer turut membawa transformasi krusial terhadap modernitas serta rasionalitas manusia dalam melakukan berbagai tindakan politik. Kehadiran politik sebagai diskursus harian yang semakin melekat tentunya tidak terlepas dari pendidikan politik. Secara sederhana, pendidikan politik atau yang sering dikenal juga sebagai edukasi politik berbeda dengan sosialisasi politik. Pendidikan politik tidak hanya bertujuan untuk memberikan pemahaman. Lebih daripada itu, pendidikan politik bertujuan untuk memberdayakan masyarakat serta menjadikan masyarakat tersebut mandiri, mampu untuk mengaplikasikan berbagai perilaku politik, dan melakukan berbagai tindakan politik berdasarkan akar rasionalitas yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat itu sendiri. Dalam konsep pendidikan politik, setiap orang dapat menjadi politisi dalam menentukan tindak sadarnya atas relasi kuasa yang menyelimuti kehidupannya. Setiap orang juga dapat menelaah dan menafsir tujuan serta manfaat politisi yang terbangun atas tumpukan *interest*, meskipun tidak selamanya bersifat rasional. Oleh karena itu, melalui perspektif Indonesia sebagai negara demokrasi, kehadiran media diyakini sebagai aktor keempat yang memiliki tugas sebagai lembaga kontrol dalam konsep *good*

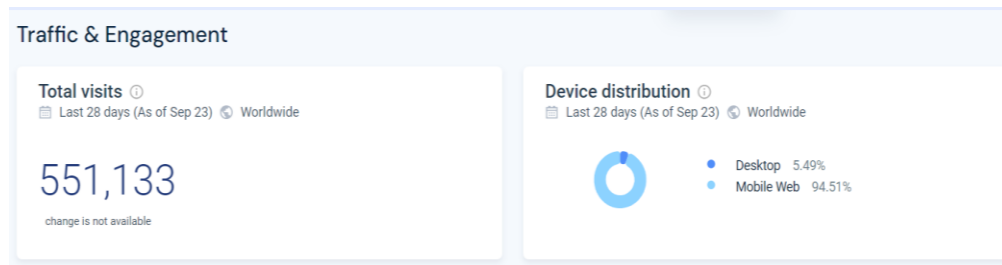
governance. Demi keberjalanan demokrasi modern yang menganut asas-asas *good governance*, media sejatinya harus turut mengalami transformasi untuk mencapai proses adaptasi yang mutakhir.

Alasan selanjutnya yang membentuk latar belakang penelitian adalah alasan empirik. Alasan empirik dimaknasi sebagai kejadian yang secara faktual terjadi dalam kehidupan nyata. Alasan empirik memberikan dasar yang kuat karena berlandaskan fakta dan data yang dapat diukur, diobservasi, ataupun diperoleh secara konkret, sehingga dapat menjadi dasar bagi penulis memilih *Website Bijakmemilih.id* sebagai objek penelitian. Adapun alasan empirik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, Berdasarkan data dari *WeAreSocial*, sebanyak 5,1 milyar dari 7,6 milyar populasi dunia adalah pengguna *mobile*. Kemudian dari 5,1 milyar pengguna *mobile* tersebut, 4,3 milyarnya adalah pengguna layanan internet aktif. Peran internet yang krusial dalam menyajikan informasi dan layanan sebagai media informasi sejatinya terdiri dari berbagai bentuk, seperti E-commerce, E-Banking, FTP (*File Transfer Protocol*), WWW (*World Wide Web*), ataupun E-mail (Salsabil, Z., Arfa M., 2019). Salah satu media yang paling populer dalam layanan informasi tersebut adalah WWW (*World Wide Web*), utamanya *website*. Data ini tentunya relevan dengan sebuah studi yang dilakukan oleh Mujani dan Liddle dalam (Noor, F., 2016) yang menyatakan bahwa pemilih pada era politik kontemporer cenderung hanya dipengaruhi oleh media dan kapabilitas kandidat. Pemenuhan kebutuhan informasi terhadap partisipan politik pada zaman digitalisasi saat ini tidak lagi

menggunakan media cetak seperti koran, buku, surat, dan lain sebagainya, tetapi sebagian besar informasi sudah dimuat dalam internet. Hal ini selaras dengan maraknya politik citra sebagai pusat eksistensi aktor politik kontemporer. Peran internet dan sorotan lensa kamera jauh lebih dimaknai daripada visi dan misi yang bermoral dan konstruktif.

Pada penelitian ini, penulis mengamati *website* yang tergolong baru di Indonesia, yaitu Bijak Memilih (bijakmemilih.id). *Website* [Bijakmemilih.id](http://bijakmemilih.id) sejatinya merupakan *website* yang tergolong mengalami perkembangan pesat, di mana *phase* pertama pada *website* tersebut diluncurkan pada Maret 2023, kemudian *phase* kedua diluncurkan pada September 2023. Pada tanggal 23 September lalu, *website* [bijakmemilih](http://bijakmemilih.id) berhasil mendapatkan 1.000.000 pengunjung *website* hanya dalam kurun waktu kurang dari setengah tahun. Berdasarkan hasil analisis *web* oleh *platform* SimiliarWeb yang diakses oleh peneliti pada tanggal 24 September 2023, *Website* [Bijakmemilih.id](http://bijakmemilih.id) berhasil memperoleh *visitors* sebanyak 551.133 hanya dalam kurun waktu 28 hari (27 Agustus – 23 September 2023). Dalam keberjalanannya, *website* [bijakmemilih](http://bijakmemilih.id) digagas oleh organisasi *Think Policy* dan media independen *What Is Up Indonesia*.



Gambar 1. 1 Hasil Analisis Website Bijakmemilih.id melalui Platform SimilarWeb

Kedua, Website Bijakmemilih.id menampilkan beragam data yang berkaitan tentang pendidikan politik. *Website* ini berisi sejarah pemilu dan fakta-fakta pemilu di Indonesia. Kemudian, terdapat isu-isu yang dapat dijadikan pertimbangan oleh pemilih dalam rangka menentukan suara mereka. Isu tersebut terdiri dari isu krisis iklim dan kerusakan lingkungan, korupsi dan hak sipil, ekonomi dan lapangan pekerjaan, kesetaraan dan inklusi sosial, serta isu pendidikan dan kesehatan. Tidak hanya sebatas pengangkatan isu, *website* ini juga menyajikan daftar partai politik yang menyetujui ataupun tidak menyetujui regulasi terhadap isu yang berkaitan. Kemudian *website* Bijakmemilih.id menyajikan profil partai politik peserta pemilu 2024, dilengkapi dengan ideologi, tokoh, fakta unik, rekam jejak, serta terdapat data korupsi yang dilakukan oleh kader partai pada tahun 2011-2023. Selain itu, juga terdapat data mantan narapidana yang dicalonkan dalam ajang pemungutan suara tahun 2024. Kehadiran *Website* Bijakmemilih.id yang tergolong baru nyatanya sudah layak mendapatkan penghargaan ajang internasional. Pada 19 September 2023, *Website* Bijakmemilih.id menjadi pemenang dalam ajang *MIT Solve's 2023 Global Challenges*.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana transformasi media pendidikan politik di era politik kontemporer melalui *Website Bijakmemilih.id*?
- b. Bagaimana peran *Website Bijakmemilih.id* dalam memberikan pendidikan politik?
- c. Bagaimana pemanfaatan media digital pada *Website Bijakmemilih.id* dalam mendukung transformasi media pendidikan politik di era politik kontemporer?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis transformasi media pendidikan politik yang terjadi di era politik kontemporer melalui kehadiran *Website Bijakmemilih.id*.
- b. Untuk menganalisis peran *Website Bijakmemilih.id* dalam memberikan pendidikan politik.
- c. Untuk mengkaji manfaat media digital pada *Website Bijakmemilih.id* dalam mendukung transformasi media pendidikan politik di era politik kontemporer.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Memperkaya ilmu dan pemahaman pembaca mengenai transformasi media pendidikan politik, implementasi fungsi pendidikan politik, serta pemanfaatan media digital yang terjadi di era politik kontemporer melalui kehadiran *Website Bijakmemilih.id*.

- b. Menjadi rujukan mengenai transformasi media pendidikan politik, implementasi fungsi pendidikan politik, serta pemanfaatan media digital di era politik kontemporer dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti selanjutnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan gambaran mengenai peran dan fungsi media, khususnya *Website Bijakmemilih.id* dalam konteks pendidikan politik yang relevan dengan era politik kontemporer.
- b. Memberikan gambaran mengenai implementasi fungsi pendidikan politik di era politik kontemporer melalui *Website Bijakmemilih.id*
- c. Memberikan gambaran mengenai intensitas dampak yang diberikan media, khususnya *Website Bijakmemilih.id* terhadap proses demokrasi.
- d. Memberikan gambaran mengenai evaluasi dari transformasi media pendidikan politik melalui *Website Bijakmemilih.id*.

1.5 Kajian Teori

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dijadikan acuan oleh peneliti dalam rangka menemukan ide, inspirasi, sudut pandang lain, melakukan perbandingan terhadap hasil penelitian yang diperoleh, serta membantu peneliti untuk menghindari segala bentuk plagiarisme. Peneliti juga menyajikan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang diangkat oleh peneliti melalui berbagai bentuk penelitian, seperti jurnal dan skripsi.

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Inri Inggrit Indrayanti, berjudul “Media dan Politik Citra dalam Politik Kontemporer.”

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk mengelaborasi situasi politik kontemporer di Indonesia yang ditandai dengan maraknya fenomena pertarungan antar calon petahana dalam rangka memenangkan opini publik. Penelitian ini mengungkapkan bahwa setidaknya ada dua cara yang dilakukan oleh partai politik untuk membentuk opini publik sesuai keinginan mereka. Pertama melalui *spin doctor* atau staf ahli tim pemenangan kampanye. Meskipun tidak selalu berhasil, akan tetapi peran *spin doctors* ini sendiri diyakini memiliki andil besar dalam membangun personal calon pemangku jabatan. Kedua, *political marketing* atau pendekatan pemasaran layaknya sebuah produk. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi politikus untuk membangun hubungan mutualisme dengan masyarakat dan konstituen.

Dalam penelitian tersebut juga dijelaskan bahwasanya terdapat tiga dimensi politik yang sedang berlangsung saat ini, yaitu dimensi politik oleh para elit, dimensi politik yang tetap dimiliki oleh kaum elit, akan tetapi secara *output* akan lebih terkoordinir, dan yang terakhir adalah dimensi *mass politics* atau keadaan di mana politik dikendalikan oleh para aktor *good governance* seperti media dan jurnalis. Sehingga pada dimensi *mass* tersebut, pembentukan citra

politik akan lebih kompleks dan memerlukan teknik *public relations* yang lebih komprehensif.

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Arpandi, berjudul “Media Online dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Umum.”

Peneliti dalam penelitian ini menyadari bahwa permasalahan mendasar yang terjadi dalam proses Pemilu di era politik kontemporer saat ini bersumber dari permasalahan teknis dalam konteks demokrasi substansial. Pemilu diyakini hanya sebagai perwujudan seremonial mencakup proses pemilihan dan perhitungan suara yang dianggap tidak lagi relevan dengan perkembangan media digital. Melalui metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, penelitian ini menyajikan bukti konkret terkait bagaimana Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui *website* resminya dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Melalui *website* tersebut juga KPU dinilai sebagai katalisator dalam memperkuat jangkauan penyebaran informasi kepada publik maupun swasta.

Dalam penelitian ini, terdapat tiga fungsi media digital dalam rangka suksesi pemilihan umum. Pertama informasi, berkaitan dengan efektivitas serta efisiensi penyebaran informasi, sehingga informasi tersebut dapat diterima oleh seluruh elemen masyarakat. Dalam konteks pemilu di Indonesia, penyaluran informasi melalui

media digital sudah dilakukan sejak tahun 2014. Kedua edukasi, berkaitan dengan manfaat yang dapat diterima oleh pembaca dan penulis lainnya melalui proses interaksi secara tidak langsung. Media digital juga dapat menjadi sarana edukasi yang kuat untuk menyampaikan himbauan dan pesan yang berkaitan dengan Pemilu. Ketiga pendidikan, merupakan fungsi media digital sebagai alat pendidikan politik dalam rangka suskesi pemilu. Informasi yang disajikan dengan faktual dan komprehensif akan menjadi tidak berguna apabila diterima oleh masyarakat yang sama sekali tidak memahami perpolitikan di Indonesia.

- c. Penelitian yang dilakukan oleh Faisal Fadilla, Hilal Ramadhani, Budi Chrismanto, dan Nisa Khoerunisa, berjudul “Dinamika Internet, Media Sosial, dan Politik di Era Kontemporer: Tinjauan Relasi Negara – Masyarakat.”

Penelitian yang dilakukan dengan metode kualitatif, pendekatan kepustakaan ini menyajikan perjalanan historis pembentukan media baru yang diinisiasi oleh terciptanya pengembangan internet melalui *World Wide Web* (WWW). WWW diyakini sebagai langkah inovatif yang menjadi pionir dalam membuka akses integrasi teks, audio, dan visual dalam satu kesatuan desain. Kemudian pada tahun 2004, WWW perlahan dikembangkan untuk memberikan kemungkinan interaksi yang lebih luas dengan para penggunanya. Interaksi ini mencakup membagikan komentar dan konten, serta membuat berbagai konten baru. Pada era politik kontemporer saat ini,

perkembangan WWW jauh lebih kompleks dan menjadi forum publik di mana masyarakat di seluruh dunia dapat mendiskusikan politik dengan luas.

Dalam penelitian ini, terdapat empat faktor yang diyakini sebagai elemen penting dalam meningkatkan perspektif wacana politik digital di Indonesia. Pertama, dinamika pertumbuhan pengguna internet di Indonesia yang menyebabkan pergeseran paradigma *gatekeeping* informasi. Hal ini terjadi secara konkret dan mengglobal pada tahun 2006, di mana hampir seluruh kampanye kandidat politik menggunakan *website*. Kedua, kemunculan aplikasi dan forum diskusi *online* memungkinkan para penggunanya untuk melakukan dialektika perpolitikan secara lebih luas.

1.5.2 Teori Transformasi

Transformasi sejatinya berasal dari Bahasa Inggris *transform*; perubahan yang berarti (1) *a complete change in appearance or character* (2) *the process of changing completely in order to improve it*. Nasukah, B., & Winarti, E. (2021) juga memiliki pendapat selaras yang menyatakan bahwa transformasi tidak hanya mengenai perubahan derajat, melainkan juga perubahan jenis. Dengan demikian maka transformasi memiliki makna sebagai proses perubahan penampilan, komposisi, struktur, atau karakter.

Teori transformasi pertama kali dicetuskan oleh Noam Chomsky dalam bukunya *Syntactic Structure* (1957). Transformasi

pada zaman ini hanya sebatas memperkenalkan konsep transformasi dalam konteks linguistik dan tata bahasa. Akan tetapi, teori transformasi Chomsky telah menjadi dasar penting dalam penyempurnaan teori transformasi. Begitu juga dengan Marshall McLuhan (1964) dan Paulo Freire (1970) yang melahirkan perkembangan transformasi dalam pendidikan serta relevansinya dengan hubungan antara pendidikan dan politik. Kemudian pada tahun 1978, Jack Mezirow turut menyempurnakan teori transformasi dengan memperkenalkan teori pembelajaran transformatif dalam konteks pendidikan. Teori ini bersumber dari penelitian terhadap kelompok wanita yang ingin melanjutkan pendidikan kembali setelah lama putus sekolah. Lalu, lahirlah asumsi yang menjadi kesimpulan bahwa terdapat perubahan cara berfikir sebagai hasil perkembangan kesadaran melalui hasil pembelajaran. Perspektif transformatif ini yang kemudian memberikan ketegasan bahwa penilaian terhadap keberhasilan atas suatu pembelajaran dapat diukur ketika peserta didik tersebut dapat menilai sendiri pengalaman pembelajarannya.

Dialektika mengenai perpektif transformatif melibatkan berbagai indikator dalam pendidikan kontemporer yang melibatkan integrasi dari banyak faktor, teori tersebut kemudian dikembangkan oleh Mezirow (2000) sebagai *integral transformative learning*. Teori ini berangkat dari pandangan bahwa manusia sedang menjalani masa transisi besar dalam sejarah, di mana berbagai perspektif saling

bersaing. Kita hidup di era yang penuh gejolak, dengan perubahan yang terus-menerus menantang kita di setiap waktu. Sehingga menjadi kewajiban sebagai seorang manusia untuk senantiasa terlibat dalam proses transformasi yang sangat mendalam serta memiliki tanggung jawab besar untuk menentukan arah yang akan diambil di masa depan.

Secara lebih luas, teori pembelajaran transformatif mendorong terciptanya teori pendidikan transformatif. McWhinney dan Markos dalam Nasukah dan Winarti (2021) menyatakan bahwa istilah pendidikan dan pembelajaran adalah dua hal yang berbeda. Belajar dimaknai sebagai proses, sedangkan pendidikan merupakan program. Dengan demikian, pendidikan dapat diartikan sebagai tahapan pembelajaran yang memiliki tujuan serta durasi waktu yang spesifik. Pendidikan harus berani menerima asumsi mengenai realitas serta moralitas sosial yang ada dan tidak serta merta terbentuk netral secara politis. Pendidikan transformatif mencakup dimensi kehidupan individu (Mezirow 2000), antara lain:

- a. Dimensi Kognitif (Rasional) yang berfokus pada perubahan pola pikir dan bagaimana seseorang dapat memahami dunia
- b. Dimensi Emosional yang berfokus pada perubahan dalam kesadaran emosional, regulasi emosi, serta empati seseorang.
- c. Dimensi Spiritual yang berfokus pada perubahan dalam pemaknaan hidup dan pengembangan spiritual.

- d. Dimensi Relasional yang berfokus pada transformasi dalam hubungan sosial dan interaksi interpersonal.
- e. Dimensi Fisik dan Konatif yang berfokus dalam perubahan, motivasi, perilaku, serta tindakan nyata seseorang.

Dengan demikian, pendidikan dengan prinsip *transformative learning* yang dilakukan hari ini adalah proses untuk menjadikan individu paham atas peran serta kontribusinya dalam masyarakat. Paradigma ini membawa individu pada kemandirian dan kebebasan dalam berfikir serta memiliki daya untuk melakukan tindakan dalam rangka perbaikan di masa depan.

1.5.3 Teori Pendidikan Politik

Manusia sebagai makhluk yang dibekali dengan akal budi untuk berpikir dan melakukan pengkaryaan dalam rangka membangun kebudayaan serta menciptakan peradaban dunianya tentu didasari oleh kesadaran dalam melakukan berbagai tindakan. Keinginan untuk melakukan kebaruan peradaban dunia berasal dari kemampuan alamiah manusia tersebut untuk bertindak adaptif menjadi lebih berkembang dan maju. Namun, untuk mempertahankan atau mengubah peradaban umat manusia pastinya diperlukan perencanaan dan kebijakan. Segala bentuk perencanaan maupun kebijakan merupakan produk yang bersumber dari para penguasa, dan salah satu jalan untuk memperoleh atau memperebutkan kekuasaan adalah melalui politik.

Kesadaran atas eksistensinya di dunia merupakan alasan fundamental mengapa manusia selalu berusaha untuk memberikan kontribusi kebaruan terhadap lingkungannya, sehingga lahir kebijakan sebagai produk untuk menjadikan dunia seperti yang diinginkan. Oleh karena itu, manusia sebagai *zoon politicon* sebagaimana yang diungkapkan oleh Aristoteles adalah manusia yang dalam aktivitas kesehariannya tidak lepas dari politik, sehingga diperlukan pendidikan politik agar tidak terjadi kesalahan dalam memposisikan diri sebagai subjek politik.

Sejatinya terdapat dua konsep dalam pendidikan politik, yakni pendidikan dan politik. Secara etimologis, pendidikan berasal dari bahasa latin "*educatum*" yang berarti berkembang atau proses perkembangan. Sedangkan politik berasal dari bahasa Yunani "*polis*" yang bermakna negara atau segala sesuatu yang berkaitan dengan pemerintahan, kota, dan negara. Berdasarkan pengertian dari dua kata tersebut, maka para ahli mencoba untuk mendefinisikan makna pendidikan politik sebagai berikut: Freire, P. (2004) menyatakan bahwa pendidikan diibaratkan seperti '*pilot project*', di mana pendidikan pasti membahas sistem politik dan kebudayaan secara komprehensif serta melampaui batasan teoritis serta doktrinasasi gaya politik tertentu. Sehingga, pendidikan politik seharusnya memiliki ruang untuk mendiskusikan berbagai masalah politik serta kekuasaan yang terjadi, memberikan penegasan terkait dengan

keyakinan seseorang, dan menjadi tempat untuk memperjuangkan peradaban masa depan manusia. Sejalan dengan pendapat Anggara, S. (2013) yang mengungkapkan bahwa pendidikan politik merupakan usaha unntuk memberikan pengaruh dalam rangka perubahan sikap perilaku yang berdasar pada nilai-nilai kesadaran dan pengetahuan untuk mengimpelementasikan suatu kebijakan.

Politik dan pendidikan dapat terwujud dalam beragam bentuk yang berbeda, sesuai dengan karakteristik serta kematangan individu dalam setiap negara itu sendiri. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang umumnya mewujudkan perubahan politik melalui pendidikan formal yang bereperan penting dalam proses rekrutmen serta pembentukan elit politik. Berbeda halnya dengan negara demokrasi modern seperti Amerika Serikat yang menjadikan pendidikan sebagai poros kehidupan politik nasional, dalam artian pendidikan politik dijadikan komoditas yang sangat krusial. Kompleksitas kehidupan yang terjadi di negara berkembang menimbulkan berbagai bentuk perbedaan pandangan yang menjadi dasar dilakukannya pendidikan politik di Indonesia, terutama oleh dan kepada generasi muda. Pertarungan politik yang terjadi akan memberikan pengaruh secara signifikan bagi proses pengambilan keputusan dalam bentuk kebijakan. Berdasarkan hal tersebut, maka pendidikan politik bertujuan untuk mempersiapkan generasi muda agar mampu bertarung secara sehat dalam berbagai realitas

kehidupan perpolitikan sesuai dengan nilai dan unsur politik di Indonesia.

Pendidikan politik dapat dilakukan untuk merealisasikan berbagai tujuan dalam sistem politik melalui penguatan fungsi dari sistem politik itu sendiri ke dalam jiwa dan pemikiran masyarakat. Adapun fungsi yang dimaksud menurut Ruslan dan Utsman (2000) adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi ideologis, dalam konteks di mana kekuasaan politik mampu menciptakan suatu ideologi yang mengharuskan masyarakat untuk mengikuti pola kehidupan sesuai dengan ketentuan ideologi tersebut. Ideologi tentunya akan menjadi ciri khas identitas masyarakat, sehingga ideologi menjadi perlu untuk ditanamkan dan diperkuat dalam pikiran dan jiwa masyarakat, tidak hanya melalui penerbitan undang-undang semata.
- b. Fungsi perkembangan, di mana pendidikan politik dapat menjadi penghubung dalam *gap* perkembangan konteks politik, seperti perkembangan konstitusi maupun regulasi dengan pemahaman serta kesadaran masyarakat atas hal tersebut.
- c. Fungsi penyaluran, dalam artian bahwa pendidikan politik berarti memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat

dalam rangka mendapatkan pembelajaran, terlebih lagi perwujudan mereka dalam partisipasi politik.

- d. Fungsi timbal balik, dalam artian bahwa pendidikan politik serupa dengan kekuasaan politik yang dapat memberikan sanksi maupun balasan positif kepada para pendukungnya. Namun, dalam sistem pendidikan politik, balasan positif menjadi orientasi bagi objek dan subjek pelaksanaannya.

Pendidikan politik juga dapat dimaknasi sebagai pendidikan publik karena pendidikan politik selalu berusaha untuk melibatkan masyarakat dalam menciptakan budaya partisipasi. Indikator keberhasilan pendidikan politik terletak pada cara penyampaian materi kepada masyarakat dan bagaimana masyarakat itu mampu terlibat dalam praktek politik. Menurut Affandi dan Suryadi (2015) bentuk pendidikan politik dapat dilakukan melalui bahan bacaan, siaran televisi dan radio, serta lembaga kemasyarakatan, bahkan lembaga agama. Tidak hanya dilakukan melalui lembaga formal, pendidikan politik juga dapat digaungkan melalui media massa. Media massa berperan besar dalam keberhasilan program pendidikan politik, sehingga dengan adanya pendidikan politik melalui media yang relevan dengan era kontemporer, generasi saat ini akan menjadi masyarakat yang sadar dan dapat memahami terlebih lagi mampu melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa.

1.5.4 Teori Media Massa

Keterbutuhan masyarakat terhadap akses informasi menjadi urgensi dalam era politik kontemporer. Media sebagai sarana penghubung yang dapat membantu proses penyaluran informasi menjadi sorotan utama dalam membentuk opini publik dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu-isu politik. Media komunikasi yang di dalamnya termasuk media massa terdiri atas media cetak, media elektronik, dan media digital (Nur, E. 2021). Dinamika proses penyebaran informasi yang semakin fleksibel menjadi tanda bahwasanya masyarakat global sudah memasuki generasi media ketiga (Faisal, dkk., 2023). Dalam era ini, penyampaian gagasan, informasi, serta berita terkini akan lebih mudah diakses melalui internet atau teknologi komunikasi yang bersifat komunikasi dua arah.

Secara historis, penggunaan media sampai pada tahap generasi ketiga merupakan upaya pemerintah untuk tetap mewadahi komunikasi masyarakat dengan pemerintah itu sendiri. Terdapat tiga fase perkembangan media, *pertama*, pembuatan *World Wide Web* (WWW) pada tahun 1990. Fase ini menjadi langkah awal yang menjadi pembuka jalan bagi format integrasi teks, audio, serta visual dalam kesatuan desain. Fase *kedua*, terjadi pada tahun 1993, di mana terciptanya *Mosaic* yang memiliki kemajuan signifikan jika dibandingkan dengan fase

pertama. *Mosaic* memungkinkan penggunaanya untuk melakukan filterisasi berdasarkan informasi yang ingin diperoleh. Fase *ketiga* adalah lahirnya mesin *Google* dan *Yahoo* yang disebut juga sebagai Web 2.0. Web 2.0 lebih memungkinkan para penggunaanya untuk melakukan komunikasi dua arah melalui komentar sampai pembuatan konten baru. Web 2.0 merupakan revolusi terbesar perkembangan internet yang berdampak signifikan terhadap segala sektor baik industri, media, maupun politik. Terdapat tiga alasan yang menjadi faktor meningkatnya peran media baru dalam dunia politik di Indonesia menurut (Faisal, dkk., 2023).

- a. Pasca reformasi, masyarakat mulai merasakan angin demokrasi yang kemudian secara sistematis membebaskan masyarakat dari belenggu keterbatasan dalam berkumpul, berserikat, dan menyampaikan pendapat secara lisan maupun tertulis (Kodiyat, M., & Asdhie, B., 2018). Peristiwa ini juga sering dikenal dengan *new public sphere*. Kebebasan tersebut kemudian secara perlahan menjadikan masyarakat aktif dalam mengkomunikasikan pendapat, persuasi, dan sampai pada tahap tertentu melahirkan tekanan baru dalam dunia politik Indonesia.
- b. Komunitas yang terbentuk dalam pusaran media dan internet turut melahirkan perkembangan identitas kolektif. Interaksi

kelas media baru menurut membawa pembahasan politik menjadi lebih luas dari apa yang pernah dibayangkan. Revisi UU KPK menjadi bukti masifnya pergerakan yang dilahirkan melalui komunitas dalam media.

- c. Integrasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan kehadiran media di Indonesia (era konvergensi media) menjadi tren menarik dalam mengamati perkembangan penggunaan media itu sendiri. Ketidakterbatasan waktu, lokasi, stratifikasi, dan bahkan ideologi memungkinkan setiap orang untuk berekspresi dalam emosi mereka (Asri, S., 2013). Ketidakterbatasan ini juga, setiap individu dapat berinteraksi dua arah, daripada hanya sekadar membaca laporan jurnalis dalam surat kabar.

Pada era politik kontemporer, peran media tidak hanya sebatas penyampai informasi, tetapi juga sebagai alat pendidikan politik yang mampu mempengaruhi persepsi dan keputusan politik masyarakat. Sejalan dengan pendapat Sumanto dan Haryanti (2021) bahwa media massa seharusnya digunakan dalam mencapai tujuan pendidikan politik. Tujuan dari pendidikan politik tentunya bergantung pada nilai dalam penerapan pola pendidikan. Oleh karena itu, mengubah dan membentuk sikap politik seseorang merupakan proses panjang penerapan pendidikan politik, salah satunya melalui media

massa. Oleh karena itu, (Nur E. 2021) menjelaskan bahwa sejatinya terdapat tiga aspek pengaruh penting media terhadap pendidikan politik, yaitu:

a. Aspek kognitif

Aspek ini merupakan proses dari ketidaktahuan menuju pengetahuan. Sebagai contoh, seseorang yang berada di dalam rumah tidak akan mengetahui apa yang sedang terjadi di luar tanpa bantuan media. Tanpa informasi eksternal, individu tersebut hanya akan terbatas pada lingkungan sekitarnya. Namun, dengan hadirnya media massa, seseorang dapat memperoleh informasi tentang peristiwa yang terjadi.

b. Aspek afektif

Berhubungan dengan perubahan perasaan atau sikap, dari yang awalnya tidak menyukai menjadi menyukai. Dalam konteks ini, media tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga dapat mempengaruhi emosi dan sikap seseorang terhadap suatu isu, individu, atau kelompok. Selain itu, aspek afektif juga memainkan peran dalam memengaruhi tingkat dukungan moral seseorang, baik itu dengan meningkatkan antusiasme dan simpati terhadap suatu hal, atau sebaliknya, mengurangi dukungan akibat paparan

informasi yang berlawanan dengan keyakinan atau nilai yang dianut.

c. Aspek konatif

Media massa memiliki peran penting dalam mempengaruhi, bahkan mengarahkan perkembangan perilaku masyarakat. Melalui konten yang disajikan, media dapat merangsang individu atau kelompok untuk bertindak atau bereaksi terhadap situasi tertentu. Misalnya, informasi yang terus-menerus disampaikan oleh media dapat mendorong masyarakat untuk mengubah kebiasaan, partisipasi politik, atau pandangan mereka terhadap isu-isu sosial.

1.6 Operasionalisasi Konsep

Tabel 1. 1 Tabel Operasionalisasi Konsep

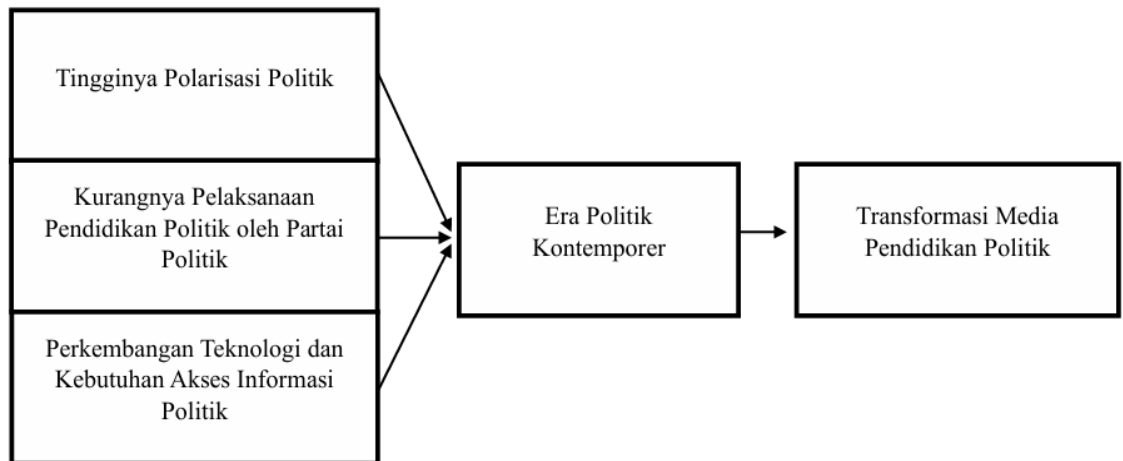
Konsep	Indikator	Sub Indikator
Transformasi merupakan proses perubahan bentuk, sifat, fungsi, dan karakteristik media edukasi politik dari platform konvensional menuju platform digital yang	a) Dimensi Kognitif (Rasional) Transformasi pola pikir dari pemikiran tradisional menuju pemikiran digital.	Proses transformasi pemahaman politik dasar menuju kompleks serta transformasi pengambilan keputusan emosional menuju rasional yang berbasis data.

Konsep	Indikator	Sub Indikator
lebih adaptif, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan era politik kontemporer.	b) Dimensi Emosional	Transformasi kesadaran
	Perubahan cara	emosi dengan
	mengelola emosi dalam politik.	peningkatan kontrol emosi.
	c) Dimensi Spiritual	Proses transformasi
	Transformasi nilai dan prinsip dalam politik.	kesadaran spiritual dan moral politik.
	d) Dimensi Relasional	Perubahan transformasi
	Transformasi interaksi sosial politik.	komunikasi dan transformasi jejaring.
	e) Dimensi Fisik dan Konatif	Peningkatan kapabilitas platform, peningkatan
	Perubahan infrastruktur media edukasi dan aksesibilitas informasi.	jangkauan platform, dan evolusi fitur digital.
Pendidikan Politik	a) Fungsi Ideologis	Metode Penyajian
merupakan pergeseran media dalam	Upaya Bijakmemilih.id dalam menyajikan dan	konten ideologis mencakup jumlah,

Konsep	Indikator	Sub Indikator
menyampaikan pendidikan politik yang relevan dengan era politik kontemporer.	menjelaskan ideologi serta nilai politik.	keberagaman topik, serta frekuensi pembaruan konten terkait ideologi dan nilai politik.
	b) Fungsi Perkembangan Strategi Bijakmemilih.id dalam meningkatkan kemampuan serta keterampilan politik penggunanya.	Peningkatan kesadaran politik dan kemampuan berfikir kritis.
	c) Fungsi Penyaluran Upaya Bijakmemilih.id dalam memfasilitasi penyaluran aspirasi dan partisipasi politik.	Dukungan terhadap partisipasi dalam pemilihan umum, meliputi fitur cek DPT dan penyediaan informasi komprehensif mengenai tata cara pemilihan.

Konsep	Indikator	Sub Indikator
	d) Fungsi Timbal Balik Upaya Bijakmemilih.id dalam memfasilitasi komunikasi dua arah.	Penyajian informasi Kebijakan pemerintah terkait kebarharuan kebijakan maupun kedalaman analisis terhadap kebijakan pemerintah yang disajikan.
Media Massa merupakan sarana dan saluran komunikasi untuk menyebarkan informasi, pesan, atau konten kepada khalayak luas secara serentak melalui berbagai platform, baik cetak, elektronik, maupun digital.	a) Aspek Kognitif Berkaitan dengan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan berpikir. b) Aspek Afektif Aspek afektif mencakup perubahan sikap, emosi, dan perasaan. c) Aspek Konatif Berkaitan dengan perubahan perilaku dan tindakan nyata.	Informasi politik dan sistem politik. Kesadaran politik dan sikap terhadap politik. Partisipasi politik dan pengambilan keputusan.

1.7 Kerangka Berpikir



Gambar 1. 2 Kerangka Berpikir

Bagan di atas menunjukkan bahwa era politik kontemporer mempengaruhi transformasi media pendidikan politik melalui teori transformasi, teori pendidikan politik, serta teori media massa dalam Website Bijakmemilih.id.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif diyakini dapat mengungkap pemahaman mendalam untuk mengkaji suatu fenomena sosial. Handoko (2024) juga berpendapat bahwa metode penelitian kualitatif selalu berupaya untuk memahami fenomena sosial melalui penggalan makna, pemahaman

terhadap konteks, serta menguraikan kompleksitas atas interaksi manusia yang terjadi.

Desain penelitian kualitatif juga dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji transformasi media edukasi politik yang terjadi melalui *Website* Bijakmemilih.id secara lebih mendalam.

1.8.2 Situs dan Subjek Penelitian

Situs penelitian ini dilakukan di jejaring *online*, yakni *website* bijakmemilih.id (<https://www.bijakmemilih.id/>). *Website* ini merupakan media yang digagas oleh *Whatisup* Indonesia dan *Think Policy* sebagai sarana relevansi komunikasi politik era politik kontemporer.

Subjek penelitian ini adalah Tim Leadership, Tim *Researcher and Writer*, Tim *Platform and Social Media*, serta Tim *Event and BMx* dari Website Bijakmemilih.id. Selain itu masyarakat yang merupakan pengguna Website Bijakmemilih.id ditentukan berdasarkan pendekatan *Snowball Sampling* dan *Purposive Sampling* dengan kriteria:

- a) Merupakan pengguna website bijakmemilih.id
- b) Memahami fitur dan konten website
- c) Pernah berinteraksi dengan konten website bijakmemilih.id

Sugiyono dalam Zuchri (2021) menyatakan bahwa pada dasarnya penentuan jumlah informan dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan rumus statistik tertentu seperti pada penelitian kualitatif, melainkan melalui beberapa pertimbangan akademis seperti teori saturasi data yang menyatakan bahwa peneliti dapat berhenti melakukan

wawancara apabila informasi yang didapat mulai berulang serta tidak terdapat data baru yang signifikan. Lincoln & Guba dalam bukunya yang berjudul “Naturalistic Inquiry” juga menyebutkan bahwa penggunaan 5-10 informan dalam penelitian tema spesifik dapat memastikan kedalaman dan kualitas informasi.

Tabel 1. 2 Tabel Karakteristik Informan

Informan	Informasi yang dicari	Jumlah
Tim <i>Leadership</i> , Tim <i>Platform and Social Media</i> , serta Tim <i>Event and BMx</i> dari Website Bijakmemilih.id	a. Latar belakang pembuatan Website Bijakmemilih.id b. Proses transformasi yang dilakukan c. Strategi pengembangan konten d. Tantangan yang dihadapi e. Rencana pengembangan Website Bijakmemilih.id	3

Informan	Informasi yang dicari	Jumlah
Ahli (<i>Specialist</i>) dalam Bidang Komunikasi, Media, atau Pendidikan Politik yang merupakan pengguna Website Bijakmemilih.id	Pengetahuan mengenai transformasi pendidikan politik, khususnya Website Bijakmemilih.id	1
Masyarakat yang merupakan pengguna Website Bijakmemilih.id	a. Pengetahuan mengenai Website Bijakmemilih.id b. Manfaat dari Website Bijakmemilih.id c. Pengalaman menggunakan Website Bijakmemilih.id d. Perubahan pemahaman politik.	6

1.8.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang bersifat kualitatif. Dalam artian, data yang diperoleh tidak berbentuk kuantifikasi, seperti angka dan bilangan numerik, sehingga tidak dapat dilakukan pengukuran secara langsung, melainkan diukur melalui penjelasan dan keterangan (Handoko, K., 2017). Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti. Pada umumnya disajikan dalam bentuk wawancara atau berinteraksi secara langsung antara peneliti dengan informan. Penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan untuk memperoleh informasi yang akan digunakan dalam rangka menjawab pertanyaan peneliti. Dalam penelitian ini, dilakukan wawancara dengan Tim *Leadership*, Tim *Platform and Social Media*, serta Tim *Event and BMx* dari Website *Bijakmemilih.id*.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari informan yang bersangkutan, melainkan data yang diperoleh melalui pihak ketiga atau dapat diperoleh melalui dokumen, ataupun arsip (Sugiyono,2017). Dalam penelitian ini, data sekunder yang diperoleh adalah melalui analisis konten *Bijakmemilih.id* yang mencakup video, infografis, atau materi lainnya. Data sekunder juga diperoleh melalui artikel dan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Kemudian laporan serta publikasi resmi di media massa lainnya yang berkaitan dengan Website *Bijakmemilih.id*.

1.8.4 Teknik Pengambilan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang secara langsung melibatkan peneliti dan informan dalam proses interaksi untuk menjawab pertanyaan peneliti (Jailani, M., 2023). Dalam penelitian ini, dilakukan wawancara semistruktur dengan pihak terkait, yaitu: Tim Leadership, Tim *Researcher and Writer*, Tim *Platform and Social Media*, serta Tim *Event and BMx* dari Website [Bijakmemilih.id](https://bijakmemilih.id). Irawan (2024) menyatakan bahwa wawancara semistruktur merupakan jenis wawancara yang memungkinkan peneliti untuk melakukan wawancara dengan lebih fleksibel. Hal ini terjadi karena dengan wawancara semistruktur, proses pengembangan dan pengajuan pertanyaan wawancara tanpa berpaku pada pedoman wawancara dapat dilakukan, sehingga peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih mendalam.

b. Observasi

Observasi merupakan kesempatan bagi peneliti dalam rangka mengamati interaksi sosial sesuai dengan konteks yang relevan dengan topik penelitian (Bodgan & Biklen, 2017). Penelitian ini melakukan observasi langsung terhadap berbagai

interaksi *online* di media sosial resmi Bijakmemilih.id, seperti Instagram, Twitter, dan TikTok.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data berupa notulen, arsip, buku, dan dokumen lainnya dalam konteks peristiwa historis yang menunjukkan perkembangan dalam fenomena yang diteliti (Creswell, 2014). Dokumentasi dalam penelitian ini bersumber dari tangkapan layar serta arsip Bijakmemilih.id

1.8.5 Analisis Data

Analisis data adalah tahapan yang digunakan untuk menggambarkan proses pengelolaan data untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Tanpa adanya analisis data, maka penelitian tidak dapat dianggap selesai. Oleh karena itu, bagian tersebut menjadi sangat krusial. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan model Milles dan Huberman. Tahapan analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman & Saldana., 2014).

a. Reduksi Data

Merupakan tahapan pengelolaan data pertama setelah mengumpulkan data di lapangan yang pada umumnya bersifat general dan luas. Reduksi data memungkinkan peneliti untuk menyeleksi secara ketat berdasarkan kategori yang relevan dengan

topik penelitian, sehingga data yang digunakan dan tidak digunakan dapat dibedakan.

b. Penyajian Data

Setelah tahapan reduksi data, maka penyajian data dilakukan untuk menampilkan data dalam bentuk naratif (catatan lapangan), sehingga dapat dianalisis apakah data yang berkaitan sudah tepat atau memerlukan tinjauan kembali.

c. Penarikan Kesimpulan

Tahapan ini merupakan tahap akhir dalam analisis data. Setelah data yang sudah terkumpul sudah memenuhi dan menjawab pertanyaan peneliti, maka dilakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi kembali untuk memastikan ulang, sehingga pada tahap ini seringkali dilakukan secara berulang untuk memastikan data diperoleh dengan benar dan terperinci.